

### BAB III

#### REVOLUSI FISIK DI SUMATERA BARAT AWAL KEMERDEKAAN

##### A. Sikap Setelah Proklamasi Kemerdekaan

Berita tentang menyerahnya Jepang terhadap Sekutu tanggal 14 Agustus 1945 sedikit terhambat sampai ke Keresidenan Sumatera Barat, tetapi tidak untuk berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berita proklamasi diterima pertama kali di Padang oleh Sudibyso dan bawahannya Aladin dari kantor Pos, Telegraf dan Telepon pada malam 17 Agustus 1945. Malam itu juga dari kantornya di Jalan Belatung, Aladin segera memberitahukannya kepada Jahja Djalil. Sejak saat itu berita proklamasi disampaikan secara *lutuik*<sup>1</sup>. Keesokan harinya kabar proklamasi kemerdekaan telah tersebar luas di kalangan masyarakat Keresidenan Sumatera Barat, karena dibantu tindakan cepat dari pemuda yang tergabung dalam Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI) dan Pemuda Republik Indonesia (PRI).<sup>2</sup>

Bentuk dukungan resmi masyarakat Keresidenan Sumatera Barat terhadap berita proklamasi kemerdekaan barulah terjadi di tanggal 29 Agustus 1945. Pada tanggal tersebut dengan sangat berani dan hati-hati untuk menghindari razia *Kampetai*, para pemuda menyebarkan ke seluruh pelosok Sumatera Barat, berupa selebaran Permakluman Kemerdekaan Indonesia yang dicetak di kantor Padang Nippo dan percetakan Gazaira.<sup>3</sup> Cabang-cabang BPPI dan PRI lainnya di Sumatera

---

<sup>1</sup> *Lutuik* adalah istilah Minangkabau, secara harfiah berarti dengkul. Suatu istilah yang benar-benar dipergunakan waktu itu untuk mengatakan pesan dari mulut ke mulut atau secara berantai.

<sup>2</sup> Mestika Zed, *Pemerintah Darurat Republik Indonesia: Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti), hlm. 19-21.

<sup>3</sup> Amura d.k.k., *Bahder Djohen: Pengabdian Kemanusiaan*, (Jakarta: P.T. Gunung Agung, 1980), hlm. 29.

Barat mengikuti langkah-langkah para pemuda di kota Padang dan Bukittinggi. Secara keseluruhan di beberapa daerah berita proklamasi sampai secara beragam, sambutan masyarakat Keresidenan Sumatera Barat terhadap berita itu umumnya sangat menggembirakan.

Tindakan menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan yang ditempuh para pemuda mendapat halangan dari Jepang. Kantor Padang Nippo dan Gazaira dikepung oleh Jepang, tetapi karena kepandaian tokoh pemuda serta pengaruh beberapa tokoh masyarakat, peristiwa pengepungan itu tidak sampai menyebabkan pertumpahan darah.<sup>4</sup> Dukungan masyarakat itulah yang menambah kepercayaan diri para pemuda yang tergabung dalam BPPI dan PRI Bukittinggi mendatangi kantor-kantor pemerintahan Jepang dan menuntut untuk menyerahkan gedung serta persenjataan kepada pihak pemuda. Pertempuran tidak bisa dihindari dan terjadi di Sungai Peruh, Painan.<sup>5</sup>

Saat pemuda berduyun mendatangi kantor-kantor pemerintahan Jepang, banyak perwira Jepang berada dalam posisi dilematis dan ragu-ragu terhadap keadaan politik yang berkembang. Sebagai pihak yang kalah perang dan terikat perjanjian dengan pihak sekutu, Jepang harus menjaga *status quo*. Namun mengingat janjinya sendiri yang sebelumnya telah diberikan kepada rakyat Indonesia dan ditambah dengan keadaan moralnya yang sedang jatuh ke tingkat paling bawah membuat sebagian besar perwira dan tentara Jepang bertindak ragu-ragu untuk mempertahankan aset milik Jepang. Perebutan aset-aset milik Jepang sebagian dilakukan lewat pertempuran, sebagian lagi perebutan gedung perkantoran, kendaraan, persenjataan dan rumah berlangsung sangat mudah, karena banyak perwira yang terkesan membiarkan perebutan terjadi. Gedunggedung perkantoran maupun rumah bekas tempat kediaman orang Jepang yang berhasil

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

<sup>5</sup> M.D. Mansoer. *Sedjarah Minangkabau*, (Jakarta: Bhatara, 1970).

direbut pemuda kemudian diserahkan kepada Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID), yang pada waktu itu bertindak sebagai wakil pemerintah pusat. Penyerahan barang-barang rampasan itulah yang membantu modal perjuangan dalam menegakkan negara Republik Indonesia di Keresidenan Sumatera Barat. Sewaktu tentara sekutu mendarat di Padang, mereka mendapati hampir seluruh jawatan dan aset-aset Jepang di kota tersebut telah diserahkan oleh Jepang kepada pihak Indonesia. Para pemuda dan tokoh-tokoh pemerintahan yang mendesak Jepang menyerahkan aset-asetnya ternyata telah banyak menduduki fungsi-fungsi pemerintahan lokal, walaupun harus diakui pula bahwa konsolidasi kekuasaan aparat pemerintahannya belum terlihat baik.<sup>6</sup>

## **B. Pembentukan BPPI, PRI dan Lembaga Pemerintahan**

Semangat pemuda yang begitu besar dan penuh inisiatif menimbulkan terciptanya beberapa organisasi kepemudaan, sebagai muara yang memperjelas arah perjuangan. Organisasi kepemudaan tersebut selanjutnya diharapkan dapat menjadi nyawa dan memberikan sumbangsih dalam pemerintahan daerah. Wilayah Keresidenan Sumatera Barat dapat dikatakan sebagai salah satu pos terdepan Republik Indonesia di Sumatera, dibandingkan dengan daerah lain di Sumatera. Para pemuda dan pemimpin di Keresidenan Sumatera Barat juga tampaknya lebih siap dan relatif berhasil mempersatukan berbagai kelompok kekuatan revolusi. Keresidenan Sumatera Barat memang bukanlah satu-satunya daerah yang mendapat kabar awal mengenai kemerdekaan Indonesia, tetapi Keresidenan Sumatera Barat memiliki potensi konflik internal yang lebih kecil jika dibandingkan dengan yang terjadi di banyak daerah revolusi di Sumatera waktu itu.

---

<sup>6</sup> Audrey Kahin, *Perjuangan Kemerdekaan: Sumatera Barat dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945-1950*, (Sumatera Barat, Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI), 1989), hlm. 60.

Pemuda dan pemimpin politik memegang kendali penting dalam perannya menyebarluaskan berita proklamasi. Usaha yang mereka lakukan untuk mempercepat agar khalayak dapat menerima kabar kemerdekaan sebenarnya terkendala oleh pihak Jepang. Jepang terus menghalangi apalagi waktu itu Jepang masih menyembunyikan kekalahannya dari sekutu. Tanggal 18 Agustus 1945 Ismael Lengah, A. Manan, A. Abdul Latief Chatib Soelaeman, Engku Abdullah dan Inyak Bas Bandaro bertemu di Padang untuk membahas perlunya sebuah badan yang nanti mampu menopang, mendukung serta melindungi kegiatan pemberitaan proklamasi secara jelas sekaligus menghilangkan keragu-raguan masyarakat. Ismael Lengah yang mengusulkan gagasan tersebut langsung mengusulkan sebuah nama BPPI<sup>7</sup> dan keesokan harinya badan tersebut ditetapkan.

Sementara itu di Bukittinggi diadakanlah sebuah rapat yang didasari oleh rasa persatuan dan jiwa kemerdekaan. Rapat tersebut berlangsung tanggal 21 Agustus 1945 dan berlangsung di Gedung Majelis Islam Tinggi. Pada rapat tersebut disepakatilah oleh para pemuda untuk membentuk sebuah organisasi yang dinamakan Pemuda Indonesia (PI). Ada perbedaan antara BPPI di Padang dan PI<sup>7</sup> BPPI adalah sebuah badan yang menjadi wadah perjuangan yang mencerminkan peranan pemuda, dibentuk tanggal 19 Agustus 1945 di Pasar Mudik dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 50 orang. Tugas BPPI adalah menampung segala persoalan dan memberikan penjelasan tentang proklamasi kemerdekaan. yang ada di Bukittinggi, yaitu tidak adanya campur tangan tokoh politisi senior seperti Ilyas Yakub dan Chatib Soelaeman yang memprakarsai BPPI di Padang.

Untuk memberikan citra dan semangat kemerdekaan, maka pemuda sepakat

---

<sup>7</sup> Amura, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Di Minangkabau 1945-1952*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1979), hlm. 25.

menambahkan kata Republik sehingga namanya menjadi Pemuda Republik Indonesia. PRI lalu memperluas daerah kerjanya hingga mencapai Rengat dan Pekanbaru, Riau.<sup>8</sup> Susunan pimpinan Pemuda Republik Indonesia waktu itu adalah: Ketua Noesjirwan A. Hamzah, Ketua I Mara Karma, Ketua II Sabaroeddin Sjamsoeddin, Sekretaris Adriansyah Jeni dan Sjojfan Tamar.<sup>9</sup>

Pada perkembangannya, pemuda yang tergabung di dalam BPPI dan PRI sangat memberikan pengaruh dalam terbentuknya lembaga pemerintahan di Keresidenan Sumatera Barat. Atas dasar desakan untuk membangun pemerintahan yang merdeka maka para pemuda merancang pertemuan yang membahas tentang penggantian *Hokokai* sebagai wadah perjuangan. *Hokokai* dinilai tidak mencerminkan lembaga yang memihak Indonesia, melainkan alat propaganda Jepang. *Hokokai* juga tidak mewakili jiwa revolusi yang menyelimuti jiwa dari setiap rakyat Sumatera Barat pada umumnya serta kaum muda pada khususnya.

Rapat yang membahas tentang pembentukan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan di Keresidenan Sumatera Barat sebenarnya sudah dimulai sejak tanggal 18 Agustus 1946, namun pada waktu itu belum ada kejelasan lembaga-lembaga apa saja yang harus mereka bentuk. Di Jakarta pembicaraan mengenai pembentukan lembaga negara dan pemerintahan baru terjadi tanggal 19 Agustus 1945, dengan salah satu agendanya adalah mengenai pembentukan sebuah komite nasional yang bertugas membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Tanggal 22 Agustus 1945 akhirnya resmi dibentuk sebuah badan yang bernama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Setelah KNIP terbentuk, maka kepada daerah-daerah juga diinstruksikan agar secepatnya membentuk

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 50

<sup>9</sup> Masmimar Markah, *Pemuda dan Proklamasi di Bukittinggi*, (Jakarta, 1990), hal 46.

Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) untuk membantu pelaksanaan tugas Gubernur, Residen dan Bupati sesuai dengan tingkatannya.<sup>10</sup>

Pembicaraan tentang pembentukan KNID di Keresidenan Sumatera Barat diadakan tanggal 29 Agustus 1945 di gedung *Seikangansyu Hokokai*, Padang. Empat puluh satu mantan anggota *Hokokai* di tingkat keresidenan bertemu. Adapun susunan anggota pengurus Komite Nasional Indonesia Daerah Sumatera Barat (KNID-SB)<sup>11</sup> pertama yang berhasil dibentuk tanggal 31 Agustus 1945<sup>12</sup> di Alang Laweh.

Rapat tersebut menghasilkan tiga keputusan yang ditandatangani oleh Mohammad Syafei atas nama bangsa Indonesia. Tiga keputusan tersebut antara lain<sup>13</sup>:

- 1) Menyiarkan proklamasi kemerdekaan untuk seluruh Sumatera dengan anjuran bahwa dengan ini seluruh rakyat Sumatera wajib mendukung dan sepenuhnya menjunjung tinggi kedua pemimpin besar Indonesia, Soekarno-Hatta.
- 2) Mengeluarkan maklumat pembubaran *Seikeigansyu Hokokai* dan menyerahkan segala harta benda yang akan meneruskan cita-cita pergerakan nasional Indonesia.

---

<sup>10</sup> Depdikbud, *Peranan Desa dalam Perjuangan Kemerdekaan di Sumatera Barat 1945-1950*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), hlm. 43.

<sup>11</sup> Lembaga pengganti *Hokokai* kemudian diberi nama Komite Nasional Indonesia (KNI). KNI dibentuk sebagai sarana pemersatu revolusi tokoh-tokoh terkemuka di Sumatera Barat. Tokoh-tokoh yang dimaksud adalah kelompok elit politik senior, pemuda aktivis dan pemuda didikan militer Jepang (*Giyugun* dan *Heiho*). Baca Mestika Zed, *Pemerintah Darurat Republik Indonesia: Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 22.

<sup>12</sup> BPSIM, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Minangkabau 194-1950 Jilid I*, (Jakarta: BPSIM, 1978), hlm. 143.

<sup>13</sup> Depdikbud, *Peranan Desa dalam Perjuangan Kemerdekaan di Sumatera Barat 1945-1950*, *loc.cit.*

3) Membentuk suatu Komite Nasional Indonesia di Sumatera Barat (KNIDSB) sesuai dengan ketentuan Presiden RI tanggal 22 Agustus 1945 dengan ketentuan bahwa Sumatera waktu anggota terdiri dari anggota pengurus mantan *Hokokai* sebanyak 41 anggota.<sup>14</sup>

Keesokan harinya tanggal 30 Agustus 1945 KNID-SB resmi dibentuk melalui rapat di Alang Lawas, Padang. Setelah KNID-SB terbentuk kemudian dibentuk pula ranting-ranting KNID di daerah tingkat *afdeeling* (kabupaten), kecamatan sampai ke *nagari-nagari*. Rapat ini menjadi rapat KNID-SB tingkat keresidenan yang pertama, rapat ini juga membahas tugas KNID-SB sebagai badan yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan sampai dibentuknya Residen.<sup>15</sup> Kehadiran KNID-SB dan KNID di daerah-daerah tingkat *afdeeling* adalah refleksi dari kebulatan tekad masyarakat Keresidenan Sumatera Barat untuk segera mempunyai tatanan pemerintahan sendiri dan menegakkan kemerdekaan serta kedaulatan Republik Indonesia. Selama berbulan-bulan setelah proklamasi, pembentukan KNID di keresidenan dan setiap kewedanaan sampai ke tingkat *nagari* merupakan peristiwa-peristiwa sipil paling penting di seluruh wilayah Keresidenan Sumatera Barat.<sup>16</sup> Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 tanggal 23 November 1945, KNID tingkat karesidenan kemudian membentuk KNID kewedanaan yang dilanjutkan dengan KNID cabang di berbagai *nagari*. Namun di beberapa desa, umumnya para pemudalah dan tokoh masyarakat yang berinisiatif mendirikan KNID pada rapat-rapat umum *nagari*. Seperti KNID pada tingkat karesidenan, maka KNID lokal membagi keanggotaannya ke dalam wakil

---

<sup>14</sup> Noersoehoed Achir, "Cerita Kekalahan Jepang Waktu Itu bagi Gelombang Kenikmatan tak Terkirakan", *Semangat*, 27-31 Agustus, 19-31 Agustus 1982 dan 1 September 1982.

<sup>15</sup> Mardjani Martamin, *Sejarah Revolusi 1945-1949: Daerah Sumatera Barat*, (Jakarta: Depdikbud, 1980), hlm 115.

<sup>16</sup> Audrey Kahin, *op.cit.*, hlm. 93.

wakil fungsional dan wakil daerah di *nagari-nagari*.<sup>17</sup> KNID di berbagai *nagari* ini bertugas bersama-sama dengan dipimpin Kepala Daerah menjalankan pekerjaan rumah tangga daerahnya, tentu tetap dalam jalur peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang lebih luas.<sup>18</sup>

Berdirinya KNI menandai dimulainya pemerintahan Republik Indonesia di Keresidenan Sumatera Barat. Residen Mohammad Syafei sebagai kepala pemerintahan telah menyusun aparat dan pegawai-pegawai pemerintahan. Saat itu jumlah pegawai di seluruh Keresidenan Sumatera Barat diperkirakan berjumlah 8000 orang. Sebagian dari mereka sudah pernah menjadi pegawai pada masa pendudukan Belanda dan ada pula yang baru menjadi pegawai pada masa pendudukan Jepang. Tanggal 8 Oktober 1945 pegawai-pegawai pemerintahan tersebut resmi dilantik dengan berdasarkan pada ketetapan Residen/Kepala Pemerintahan Republik Indonesia Sumatera Barat.<sup>19</sup>

Tanggal 15 Oktober 1945 diadakanlah Konprensi Pemerintah Keresidenan Sumatera Barat untuk pertama kalinya di gedung Balai Kota Padang. Pertemuan ini diharapkan dapat mengukuhkan kedudukan pemerintah Keresidenan dan mempererat hubungan di kalangan pejabat daerah. Konprensi tersebut dihadiri oleh seluruh pejabat kantor residen, kepala-kepala *Luhuk* (Kabupaten), Demang

---

<sup>17</sup> Kisaran tahun 1945-1948 KNID Sumatera Barat telah melakukan pertemuan pleno sebanyak sepuluh kali. Hasil pertemuan kelima tanggal 16-18 Maret 1946 membahas tentang pembentukan tiga tingkatan dewan-dewan perwakilan rakyat. Tingkat pertama adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat, kedua adalah Dewan Perwakilan Kota dan yang ketiga adalah Dewan Perwakilan Nagari (DPN) di setiap *nagari* di Sumatera Barat. Baca Kementrian Penerangan, *Republik Indonesia: Propinsi Sumatera Tengah*, (Jakarta: Kementrian Penerangan), hlm. 114. Lebih jelas baca Depdikbud, *Revolusi Nasional Tingkat Lokal*, (Jakarta: Depdikbud, 1989), hlm. 126-129.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Depdikbud, *Revolusi Nasional Tingkat Lokal*.

<sup>19</sup> Amura *loc.cit.*, hlm. 54.

(Wedana) dan kepala-kepala polisi di wilayah Keresidenan Sumatera Barat. Salah satu keputusan penting dalam konprensi tersebut adalah pengangkatan sumpah jabatan yang tetap setia kepada pemerintah Republik Indonesia. Berikut adalah bunyi sumpahnya:<sup>20</sup>

- 1) Saya bersumpah, berjanji dengan sepenuh-penuhnya akan memenuhi kewajiban saya sebagai pejabat daerah yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia.
- 2) Saya bersumpah, setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan kepada peraturan-peraturan yang datang dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia.
- 3) Saya bersumpah, sedia memberikan segenap pikiran, tenaga, harta dan jiwa untuk negara, tanah air dan bangsa.
- 4) Saya bersumpah, akan selalu bersungguh-sungguh memajukan daerah pemerintah saya, serta bekerja dan berlaku jujur dan adil dengan tidak memandang orang dan golongan. Perjanjian saya ini dengan hati yang suci, jika saya tidak memenuhi sepanjang perjanjian ini, maka kalamullah adalah balasannya.

### **C. Organisasi dan Badan Kelaskaran**

Pada awal kemerdekaan polarisasi antara kelompok-kelompok pemuda aktivis (politik) dengan para pemuda yang sempat mendapat pelatihan militer belum terlihat padu. Langkah cepat diambil oleh para pemimpin BPPI di bawah pimpinan Ismail Lengah, mengirim kurir ke desa-desa untuk memanggil kembali para mantan *Giyugun*, *Heiho* dan *Seinendan* agar segera mendaftarkan diri menjadi anggota BKR.<sup>21</sup> Selain untuk menyatukan arah perjuangan pemuda, pemanggilan ini

---

<sup>20</sup> *Ibid.*,

<sup>21</sup> Mestika Zed, *Giyugun: Cikal Bakal Tentara Nasional di Sumatera*, (Jakarta: LP3ES, 2005), hlm. 117.

juga sebagai penerapan perintah dari Dekrit Presiden 25 Agustus 1945. Tidak berselang terlalu lama pada 5 Oktober 1945 terbit maklumat pemerintah mengenai pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), maka semua anggota yang telah mendaftar menjadi BKR di Sumatera Barat secara langsung dapat menjadi keanggotaan TKR.<sup>22</sup> Hanya dalam waktu singkat TKR dapat dibentuk tidak hanya meliputi wilayah Keresidenan Sumatera Barat saja, melainkan juga sampai ke Riau dan Jambi. Kesatuan-kesatuan TKR untuk pertama kali baru berbentuk batalion-batalion yang dibagi menurut tempat-tempat yang diduduki dengan pemimpin masing-masing di setiap wilayah. Ismael Lengah menjadi Pemimpin Umum Komandan Daerah, sedangkan untuk TKR Padang dipimpin oleh Jazid Abidin, TKR Bukittinggi dipimpin oleh Dahlan Djambek, TKR Pekanbaru (Riau) dipimpin oleh Hasan Basri dan TKR Jambi dipimpin oleh Abun Djani.<sup>23</sup>

Para pemuda yang tidak menjadi anggota BKR atau TKR membuat persatuan-persatuan kelaskaran yang masih tetap diakui pemerintah sebagai mitra TKR dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Kedudukan badanbadan kelaskaran ini diperjelas dengan ketetapan Presiden tanggal 6 Mei 1947, yang menjelaskan agar badan-badan kelaskaran dan TKR dapat bekerja sama dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. Badan kelaskaran menyambut baik keputusan Presiden yang menghargai posisi mereka, kemudian badan-badan kelaskaran ini mengadakan pertemuan. Pada bulan Juli 1947 pertemuan dari badan Kelaskaran menghasilkan gagasan untuk membentuk Dewan Kelaskaran, dewan ini

---

<sup>22</sup> Kahin, *op.cit.*, catatan No. 43 Bab. III.

<sup>23</sup> Amura, *op.cit.*, hlm. 62. Ismael Lengah menghimpun sekaligus merekrut bekas *Giyugun* untuk masuk dalam wadah TKR Padang. Komandan TKR Padang, Jazid Abidin berhasil mengumpulkan kekuatan sekitar 800 orang. Dari Padang, BKR dengan cepat menyebar ke beberapa daerah sampai di Riau. Lebih jelas Baca Mestika Zed, *Giyugun: Cikal Bakal Tentara Nasional di Sumatera, op.cit.*, hlm. 118.

kemudian bergabung dalam Legiun Sahid.<sup>24</sup> Adapun badan-badan kelasykaran yang berdiri pada waktu itu antara lain:<sup>25</sup>

#### 1) Barisan Hizbullah

Pembentukan kelaskaran ini berasal dari inisiatif pimpinan Muhammadiyah. Pada 1 Oktober 1945 pemimpin Muhammadiyah Sumatera Barat mengumpulkan para pemuda Muhammadiyah dan mantan pandu Hizbulwathan di Padang Panjang untuk memperoleh penjelasan mengenai pembentukan satu badan perjuangan di Keresidenan Sumatera Barat, yang kemudian dinamai Hizbullah. Para pemuda yang ikut tergabung dalam Hizbullah diberi pelatihan, sebelum mereka disebar ke daerah masing-masing. Pada 22 November 1945 diresmikanlah berdirinya Barisan Hizbullah di kota Padang Panjang yang kemudian menyebar ke Bukittinggi.

#### 2) Barisan Hulubalang

Badan kelaskaran ini beranggotakan pemuda dan tokoh dari golongan adat. Pada 10 Oktober 1945 Barisan Hulubalang resmi berdiri dan Dt. Simandjo sebagai ketuanya. Barisan Hulubalang ini pertama kali berdiri di Padang Panjang dengan pimpinan R.O. Gando Sinard yang kemudian disusul kota-kota lain di Keresidenan Sumatera Barat.

#### 3) Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI)

PERTI telah berdiri sejak zaman pendudukan Jepang dan tidak mengalami pembekuan keanggotaan atau pembubaran. PERTI focus pada pengarahan perjuangan di bidang pendidikan agama dan tidak mencampuri permasalahan politik. Tetapi dalam pertemuan yang diadakan di Bukittinggi tanggal 26 November 1945, PERTI mengubah landasan dasar organisasinya

---

<sup>24</sup> Depdikbud, *Peranan Desa dalam Perjuangan Kemerdekaan di Sumatera Barat 1945-1950*, *op.cit.*, hlm. 48-49.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 51-52.

menjadi sebuah partai politik. Sejak saat itu PERTI berubah nama menjadi Partai Politik Islam PERTI.<sup>26</sup>

#### 4) Laskar Muslimin Indonesia (LASMYI)

PERTI membentuk LASYMI pada 24 Desember 1945 yang kemudian dilengkapi dengan barisan puteri laskar muslimat. LASMYI di Bukittinggi dipimpin oleh Sofyan Siraj. Pada 3 Juli 1947 pemerintah berinisiatif untuk mempersatukan usaha dan kekuatan perjuangan besenjata, baik yang dilakukan oleh TKR atau pun Badan Kelaskaran. Inisiatif tersebut adalah dengan dibentuknya sebuah lembaga keamanan yang terikat langsung dengan pemerintah, yang kemudian dinamakan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tetapi penggabungan badan kelaskaran dan TKR tidak segera bisa diwujudkan, dikarenakan keadaan perjuangan dengan lingkup berbeda dan dipengaruhi keadaan politik pemerintah pusat yang sedang mengalami perubahan.<sup>27</sup>

### **D. Agresi Militer Belanda I dan II**

Wilayah Indonesia pada dasarnya berada di bawah *South East Asia Command* (SEAC) yang dipimpin langsung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat kemudian menyerahkan pengawasan Indonesia kepada Inggris. Atas dasar inilah Inggris membentuk *Allied Forces Netherlands East Indies* (AFNEI) di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. AFNEI berkekuatan tiga divisi dengan tugas melaksanakan perintah gabungan kepala-Kepala staf Sekutu yang diamanatkan oleh SEAC, perintah itu antara lain:<sup>28</sup>

1) Menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang.

---

<sup>26</sup> Amura, *op.cit.*, hlm. 60.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

<sup>28</sup> Anhar Gonggong, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, (Jakarta: Depdikbud, 1993), hlm. 49.

- 2) Membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu.
- 3) Melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk dipulangkan ke Negara asalnya.
- 4) Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai di kota-kota besar (Jakarta, Semarang, Surabaya, Padang, Medan) untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintahan sipil.
- 5) Menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut mereka di depan pengadilan Sekutu.

Pada awalnya pasukan sekutu menyatakan akan menghormati kemerdekaan Indonesia dan hanya akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan keputusan sekutu. Ternyata dalam rombongan AFNEI, terdapat orang-orang *Netherland Indie Civil Administration* (NICA) yang terang-terangan ingin menegakkan kembali Negara Hindia Belanda. Sikap inilah yang menyebabkan pandangan bangsa Indonesia terhadap pasukan sekutu berubah.<sup>29</sup> Pasukan sekutu tiba di Keresidenan Sumatera Barat tanggal 20 Agustus 1945 yang diwakilkan oleh pasukan Palang Merah. Pada 8 September dan 23 September 1945 diterjunkan kembali pasukan kecil dengan tugas memberikan penjelasan mengenai kedatangan pasukan sekutu ke Sumatera Barat. Pemerintah Republik Indonesia di Keresidenan Sumatera Barat memahami maksud yang disampaikan pasukan sekutu dan bersedia membantu menyelesaikan tugas-tugas sekutu.<sup>30</sup> Tetapi keadaan mulai bisa dibaca oleh pihak Indonesia, bahwasannya sikap dingin pasukan sekutu hanyalah strategi agar rencana mereka menguasai Indonesia dapat berjalan baik.

Pasukan NICA yang didukung Sekutu mulai berlaku angkuh dan semenamena dengan meminta pasukan Sekutu untuk menduduki gedung-gedung

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Depdikbud, *Sejarah Daerah Sumatera Barat*, (Jakarta: Depdikbud, 1978), hlm. 132.

bekas pemerintahan Hindia Belanda dulu. NICA juga aktif melakukan infiltrasi dan provokasi, mereka mendatangi kantor-kantor pemerintahan dan menghubungi pegawai-pegawai lama untuk diajak bekerja kepada mereka lagi, tentu dengan dijanjikan gaji yang tinggi.<sup>31</sup> Bahkan orang-orang NICA berani menurunkan bendera Merah Putih di kantor Syahbandar, di Teluk Bayur. Mulai saat itu suhu politik antara pasukan sekutu dan pihak Indonesia di Sumatera Barat meningkat. Seperti di Jawa, selama lama tiga belas bulan di Keresidenan Sumatera Barat hubungan pasukan Sekutu dengan pihak Indonesia selalu tegang.

Pemerintah Indonesia lalu menempuh cara perundingan dengan pasukan Sekutu dan Belanda, perundingan tersebut dikenal dengan nama Perjanjian Linggarjati<sup>32</sup> yang ditandatangani tanggal 16 November 1946. Alasan pihak Indonesia menempuh jalur perundingan adalah karena cara damai merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, mengingat kekuatan militer Indonesia jauh di bawah Belanda dan melalui perundingan akan mengundang reaksi positif dunia internasional.

Agresi militer Belanda kedua di Keresidenan Sumatera Barat dimulai dengan kedatangan pesawat terbang Belanda di atas kota Bukittinggi tanggal 19 Desember 1948. Sebagian orang mengira bahwa pesawat itu sedang membawa rombongan Presiden Soekarno dalam perjalanan menuju India, sehingga para

---

<sup>31</sup> Endri Gani, "Perlawanan Rakyat Sumatera Barat pada Masa Revolusi: Dalam Perspektif Historis", *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1996), hlm. 82.

<sup>32</sup> Perjanjian Linggarjati diadakan mulai tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Isi pokok perjanjian Linggarjati antara lain adalah, pertama Belanda mengakui secara *de facto* wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera dan Madura. Kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Ketiga, Pihak Belanda dan Indonesia Sepakat membentuk negara RIS dan harus tergabung dalam *Commonwealth/Persemakmuran* Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni.

pemimpin Bukittinggi mempersiapkan penyambutan di pangkalan udara Gadut. Perkiraan itu ternyata terbukti salah karena pesawat tersebut menjatuhkan pamflet-pamflet yang menyatakan bahwa Persetujuan Renville tidak berlaku lagi. Pagi itu pula pesawat itu terbang Belanda menyerang Bukittinggi dan sekitarnya dengan bom, menembaki pemancar Radio Republik Indonesia (RRI) serta kendaraan yang bergerak di sepanjang jalan. Akibat penembakan dan pemboman itu kota Bukittinggi dan sekitarnya dilanda kepanikan, sebagian penduduk berusaha mencari perlindungan dan mengungsi keluar kota. Sebagian lainnya mencoba tetap tenang dan mencari tahu apa yang terjadi lewat siaran radio.

Belanda juga di saat bersamaan secara besar-besaran menggerakkan satuan militernya dari kota Padang menuju ke segala wilayah di Keresidenan Sumatera Barat. Dimulai dengan meluncurkan pesawat pengintai, pesawat pemburu dan pesawat bom. Pesawat jenis Catalina<sup>33</sup> itu menerjunkan pasukannya ke Danau Singkarak dan Batu Tebal. Daerah pedesaan dan pedalaman untuk sementara dipilih para pemimpin untuk musyawarah dan menganalisa keadaan serta secara langsung telah menjadi basis pertahanan. Salah satunya adalah di Lembah Anai yang menuju ke Padang Panjang, Belanda melancarkan serangannya dengan segenap kekuatan militer baik darat maupun udara. Beruntung sekali bagi pihak Indonesia, dikarenakan bentang alam yang strategis sepanjang Lembah Anai ke arah Padang Panjang dan Bukittinggi, Belanda tidak bisa menembus pertahanan yang dibuat oleh pihak Indonesia.<sup>34</sup>

Bukittinggi yang saat itu adalah Ibu Kota Provinsi Sumatera Tengah menjadi sasaran utama bagi Belanda dalam serangannya pada Agresi Militer kedua ini. Pemimpin Sumatera Barat memutuskan untuk meninggalkan Bukittinggi dan

---

<sup>33</sup> Pesawat jenis Catalina adalah pesawat yang dapat mendarat di darat dan di air.

<sup>34</sup> Amura, *op.cit.*, hlm. 130.

perjuangan selanjutnya dilakukan secara gerilya. Pemimpinpemimpin itu antara lain, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia Mr. Syafruddin Prawiranegara, Mr Teuku Moh. Hasan sebagai Ketua Kompemsus Sumatera, Gubernur Sumatera Tengah Mr. Nasrun dan PTTS Kolonel Hidayat serta Mr. St. Moh. Rasjid. Para pemimpin itu meninggalkan Bukittinggi menuju kompleks perkebunan teh Halaban, di sebelah selatan Payakumbuh. Para pemimpin tetap berjiwa besar dan pantang surut bahwasannya perjuangan jangan berhenti apalagi hilang hanya karena keadaan politik negara sedang dalam keadaan genting.

Tanggal 19 Desember 1948 datanglah sebuah telegram dari Yogyakarta, yang menyebutkan Belanda juga telah menyerang pemerintahan Republik di Yogyakarta. Atas dasar pertimbangan keselamatan negara dan Presiden maka Presiden menunjuk Mr. Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).<sup>35</sup> Isi Telegram tersebut tersebut adalah: Kami Presiden Republik Indonesia memberitakan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948, djam 6 Pagi Belanda telah memulai serangannya atas Ibu Kota Jogjakarta. Djika dalam keadaan pemerintahan tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, kami menguasai kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia untuk membentuk Pemerintah Republik Darurat di Sumatera. Jogjakarta, 19 Desember 1948.<sup>36</sup>

Setelah terbentuknya PDRI maka Mr.St. M. Rajid selaku Ketua DPD Sumatera dan anggota PDRI menyingkir ke Koto Tinggi, yang terletak dalam wilayah kabupaten Limapuluh Kota. Di tempat itulah diteruskan pemerintahanke seluruh Sumatera Barat, karena di sana berkumpul pegawai-pegawai tinggi Keresidenan Sumatera Barat. Seluruh Bupati dan Wedana di Sumatera Barat

---

<sup>35</sup> Amura, *op.cit.*, hlm. 128.

<sup>36</sup> *Ibid.*,

diberitahukan bahwa pemerintah Keresidenan Sumatera Barat sifatnya berpindahpindah. Setiap instruksi dari Ketua DPD Keresidenan Sumatera Barat dikeluarkan dengan tidak ditentukan tempatnya secara jelas, cukup menuliskan kalimat di suatu tempat di Sumatera Barat. Hal ini sangat membuat Belanda menjadi sulit membaca peta pemerintahan dan kekuatan militer di Keresidenan Sumatera Barat. Sampai bulan April 1949 pasukan Belanda telah berhasil merebut kota-kota penting di Sumatera Barat seperti Solok, Padang Panjang, Bukittinggi, Batu Sangkar, Payakumbuh, Sawah Lunto, Sijunjung Alahan Panjang, Muara Labuh, Pariaman dan Sungai Penuh. Tetapi dengan jatuhnya kota-kota penting bukan berarti Belanda sudah berkuasa di Keresidenan Sumatera Barat. Pasukan Belanda hanya menguasai kota-kota sedangkan untuk daerah-daerah di luar kota yaitu desa dan nagari, baik siang maupun malam harinya hampir dikuasai oleh TNI dan rakyat.<sup>37</sup>

#### **E. Terbentuknya Propinsi Sumatera Tengah**

Sumatera mempunyai peran penting dalam kesertaannya mempertahankan kedaulatan Indonesia. Sumatera dianggap tempat peralihan paling tepat seandainya Belanda berhasil menguasai pusat-pusat pemerintahan di Jawa. Satu satunya kendala saat itu yang bisa menjadi penghalang adalah karena ketidakmampuan Gubernur Sumatera, Hassan dalam menjalankan kekuasaannya terhadap sejumlah keresidenan di Sumatera. Pada awal kemerdekaan Keresidenan Sumatera Barat adalah salah satu dari sepuluh keresidenan yang termasuk ke dalam Propinsi Sumatera. Sepuluh keresidenan tersebut adalah Aceh, Sumatera Barat, Tapanuli, Riau, Jambi, Palembang, Bengkulu, Lampung dan Bangka-Belitung. Gubernur dari

---

<sup>37</sup> V. Sardjono dan G.H. Marsadji, *Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) Penyelamat Negara dan Bangsa Indonesia*, (Jakarta: Tinta Mas, 1982), hlm. 31.

propinsi Sumatera berkedudukan di Medan.<sup>38</sup> Luasnya wilayah propinsi Sumatera ini yang membuat Gubernur Sumatera tidak bias menjangkau semua wilayah dalam pemerintahannya.

Langkah awal dilakukan untuk mengatasi kendala wilayah Sumatera yang terlalu luas dan tidak efektif dalam pemerintahan adalah dengan membentuk tiga wilayah sub-propinsi di Sumatera. Wilayah sub-propinsi yang dimaksud adalah membentuk sub-propinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan dengan dipimpin oleh Gubernur Muda di setiap wilayah, tetapi unit administrative sub-propinsi ini tidak ada dalam susunan ketatanegaraan Indonesia. Sejak pertama kali dibentuk hingga tahun 1948 tidak banyak yang dilakukan Gubernur Muda. Gubernur Muda tidak mempunyai acuan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya, serta tumpang tindihnya kekuasaan pemerintahan serta berkumpulnya hampir semua petinggi negara, mulai dari Residen Sumatera Barat, Gubernur Sumatera, Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera hingga wakil Presiden di daerah ini waktu itu.

Ketidakjelasan tugas Gubernur Muda diakhiri dengan keluarnya Undang-Undang No. 10/1948 tentang Pembagian Sumatera menjadi tiga propinsi. Propinsi-propinsi itu nantinya diharapkan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara lebih rinci. Ketiga daerah propinsi itu adalah Sumatera Utara yang meliputi Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli. Sumatera Tengah yang meliputi Kerisedenan Sumatera Barat, Riau dan Jambi; serta Sumatera Selatan yang meliputi Keresidenan Palembang, Bengkulu, Lampung dan Bangka-Belitung.<sup>39</sup> Masing-masing propinsi akan diberi kekuasaan menjadi daerah yang otonom dan masih mempertahankan posisi Gubernur Muda sebagai wakil-wakil di setiap propinsi.

---

<sup>38</sup> D. Rini Yunarti, *BPUPKI, PPKI, Proklamasi Kemerdekaan RI*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 145.

<sup>39</sup> Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 17.

Undang-undang yang dikeluarkan pada bulan April 1948 oleh Perdana Menteri Moh. Hatta itu juga menuntut dihapuskannya keresidenan, kecamatan dan kewedanaan yang ada di Sumatera. Undang-undang No.10/1948 ini diperkuat oleh keluarnya Undang-undang No. 22/1948 tentang Pemerintah Daerah. Moh. Nasrun yang sedang menjabat sebagai Gubernur Muda saat Undang-undang itu diputuskan mendapatkan bantuan dari pemerintah dengan mengangkat seorang Gubernur Kepala Daerah Sumatera Tengah. Undang-undang tersebut juga berdampak pada legislatif, keluarnya UU No. 10 diikuti dengan pembubaran KNID-SB, Riau dan Jambi serta menggabungkannya menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Tengah (DPRST). Sejak saat itu, walaupun diselingi oleh pemerintahan militer, baik di Sumatera Barat, Riau dan Jambi secara yuridis Sumatera Barat telah resmi menjadi bagian dari Sumatera Tengah. Bukittinggi dipilih menjadi Ibu Kota Sumatera Tengah dengan pertimbangan bahwa Bukittinggi dianggap telah berpengalaman menjadi jantung seperti saat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Gusti Asnan, *op.cit.*, hlm. 18. Pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Kota Bukittinggi berperan sebagai kota perjuangan, ketika pada tanggal 19 Desember 1948 kota ini ditunjuk sebagai Ibu Kota Negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Selanjutnya Kota Bukittinggi menjadi kota besar berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota besar dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah. Lebih jelas baca Mestika Zed, Eddy Utama, Hasril Chaniago, *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995*, (Panitia Peringatan 50 Tahun RI, 1995).